



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN KOMISARIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIAN NOOR
2. Jabatan : KOMISARIS UTAMA
3. NHK : 857250

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/96 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Bangunan Seluas 174 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **824.480.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 571.680.000
2. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 252.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **4.903.798.450**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **10.428.278.450**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **10.428.278.450**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN KOMISARIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LIE SURATNO
2. Jabatan : KOMISARIS
3. NHK : 1011688

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/53 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	700.000.000
1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER2.8VRZTSS2AT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	703.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.607.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.607.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN DIREKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BENEDICTUS M WAWORUNTU
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 800973

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	13.800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/242 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 17.69 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 331 m2/331 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	1.200.000.000
1. MOBIL, LEXUS RX 200T LUXURY AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
2. MOBIL, LANDROVER DISC SPORT20HSESI4 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	110.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	23.649.278.193
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.199.018.517
Sub Total	Rp.	39.958.296.710
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	39.958.296.710



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 April 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN DIREKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BEATRIX SANTI ANUGRAH
2. Jabatan : DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
3. NHK : 877633

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **39.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m2/254 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000.000
2. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 795 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 1.300.000.000
5. Tanah Seluas 293 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/73 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **743.000.000**

1. MOBIL, BMW - Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. MOBIL, MAZDA MAZDA 2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
3. MOTOR, HONDA - Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA - Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOBIL, HONDA SATYA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.475.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	75.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.897.385.757
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.710.000.000
Sub Total	Rp.	46.200.385.757
III. HUTANG	Rp.	6.227.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	39.973.385.757

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN DIREKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DELIL KHAIRAT
2. Jabatan : DIREKTUR TEKNIK DAN OPERASI
3. NHK : 898467

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.754.079.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/90 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/72 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 574.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/140 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.504.758.400
5. Tanah dan Bangunan Seluas 21.84 m2/21.84 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 323.695.600
6. Tanah Seluas 230 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 391.000.000
7. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 185.625.000
8. Tanah Seluas 962.5 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **425.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	29.352.750
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	882.058.545
F. HARTA LAINNYA	Rp.	4.395.984.891
Sub Total	Rp.	12.486.475.186
III. HUTANG	Rp.	3.316.394.799
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.170.080.387

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN DIREKSI

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ROBBI YANUAR WALID
- Jabatan** : DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN CORPORATE SECRETARY
- NHK** : 827307

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.080.000.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 3554 m2/100 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 1963 m2/300 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
- Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **735.000.000**

- MOBIL, SUZUKI JIMNY JEEP Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
- MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 CC STREET BIKE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
- MOTOR, HONDA CBX 500 STREET BIKE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- MOTOR, HONDA PCX MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.



20.000.000

6. MOBIL, MAZDA CX 5 SUV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

350.000.000

7. MOBIL, WULING AIREV MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI

Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 3.800.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 726.980.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.355.980.000

III. HUTANG Rp. 183.584.873

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.172.395.127

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.